

SKRIPSI
ANALISIS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI
KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan Diajukan oleh

Hardiyanti Achmad

E121 16 314



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN
LUWU TIMUR**

Disusun dan di ajukan oleh:

HARDIYANTI ACHMAD

E 121 16 314

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si
NIP. 19601123 198603 2 001

Rahmatullah, S.IP.,M.Si
NIP. 19770513 200312 1 002

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si
NIP. 19640727 199103 100

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hardiyanti Achmad

N I M : E121 16 314

Departemen : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

ANALISIS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN

LUWU TIMUR

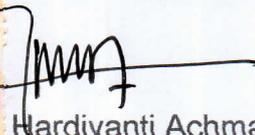
Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2023



Yang menyatakan


Hardiyanti Achmad

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Dan tak lupa juga penulis haturkan salam dan shalawat kepada suri tauladan Muhammad shallallahu alaihi wassallam, penuntun umat manusia menuju jalanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Luwu Timur**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Gadi Hasis, Asmawati, Sunarya dan almarhum M. Attas. Dan juga kepada suami penulis Hendra S.Pt. Terima kasih atas doa, dukungan, nasehat dan pengertiannya selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi guru di kehidupan penulis. Doa terbaik untuk kalian semua. Amin

Terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;

2. Bapak Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya;
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta staf;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si selaku Pembimbing Akademik, serta sebagai Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dari awal perkuliahan, penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Rahmatullah, S.IP. M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi;
6. Kepada para Tim Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini, yakni Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Bapak Ashar Prawitno S.IP., M.Si
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, terkhusus Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
8. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu Ibu Andi Tabacina Akhmad M.Si selaku pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dan berbagai pihak yang turut membantu

dalam memberikan informasi yang tak dapat kami sebutkan satu per satu;

Terima kasih juga kepada kalian semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Baik Keluarga, Teman-teman Verenigen16, maupun pihak lain yang telah membantu penulis dalam menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin ini. Atas doa, semangat dan dukungannya sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, penulis berharap saran kritik yang dapat membangun skripsi penelitian ini, karena penulis mengetahui dan sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang mesti untuk disempurnakan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 1 Juni 2023

Hardiyanti Achmad

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
INTISARI	4
ABSTRAK	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang Masalah.....	6
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Konsep Analisis	22
2.2 Konsep Pembangunan.....	28
2.3 Konsep Pariwisata	30
2.4 Pembangunan Kepariwisataaan	38
2.5 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan	
Kabupaten Luwu Timur	44
2.5 Kerangka Pikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Tipe Penelitian	50
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	50

3.3 Informan Penelitian	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.5 Jenis Data	52
3.6 Fokus Penelitian.....	53
3.7 Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.2 Pembangunan Kepariwisata Di Kabupaten	
Luwu Timur	68
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Kepariwisata	
Di Kabupaten Luwu Timur	84
BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Objek Wisata di Kabupaten Luwu Timur 2021	16
Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Luwu Timur	57
Tabel 4.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Luwu Timur	60
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Luwu Timur	61
Tabel 4.4 Persentase Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Luwu Timur	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten
Luwu Timur60

INTISARI

Hardiyanti Achmad, Nomor Induk Mahasiswa E121 16 314, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Luwu Timur”, di bawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Rabinah Yunus, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur. Serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif, yang memberikan gambaran secara jelas dan faktual mengenai peran pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan beberapa hal dalam pembangunan kepariwisataan yang meliputi industry pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata. 2) Faktor-fakto pendukung dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur ialah daya tarik pariwisata dan aksesibilitas pariwisata. Sementara itu, factor penghambat dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Luwu Timur ialah kelembagaan pariwisata dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pariwisata dan Pembangunan Kepariwisata

ABSTRAK

Hardiyanti Achmad, Student Identification Number E121 16 314, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Compiled a thesis entitled "Analysis of Tourism Development in East Luwu Regency", under the guidance of Prof. Dr. Rabinah Yunus, M.Si as Principal Supervisor and Mr. Rahmatullah, S.IP, M.Si as Co-Supervisor.

This study aims to determine tourism development in East Luwu Regency. As well as, to find out the supporting and inhibiting factors for tourism development in East Luwu Regency.

The type of research used in this research is descriptive with qualitative data analysis techniques, which provide a clear and factual picture of the role of local governments in tourism development

The results of this study indicate that: 1) The Regional Government of East Luwu Regency has done several things in tourism development which include the tourism industry, tourism destinations, tourism marketing and tourism institutions. 2) Supporting factors in tourism development in East Luwu Regency are tourism attractions and tourism accessibility. Meanwhile, the inhibiting factors in tourism development in East Luwu Regency are tourism institutions and community participation.

Keywords: Tourism and Tourism Development

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah atau budaya yang sangat berlimpah. Berlimpahnya sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah atau budaya yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat diunggulkan kebanyakan daerah di Indonesia karena kemampuannya dalam menopang perekonomian daerahnya. Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan menjadi sumberdaya yang dapat mendukung peningkatan potensi yang terdapat pada suatu daerah, sehingga diharapkan mampu mempersempit kesenjangan yang mungkin terjadi dengan daerah lain yang memiliki sumberdaya sejenis.

Pariwisata menjadi industri yang mempunyai peran sebagai *multiplier effect* dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Dampak penting berkembangnya pariwisata salah satunya merupakan adanya perbaikan dan pembangunan infrastruktur sosial di suatu wilayah destinasi pariwisata, seperti bandar udara, hotel, akses jalan, transportasi, industri kerajinan, dan industri-industri lainnya yang

mempunyai hubungan dengan industri pariwisata yang semuanya itu dibutuhkan dalam menjamin kenyamanan wisatawan menuju dan tinggal selama di destinasi pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu sarana yang tepat dalam meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat lokal seperti, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi di suatu daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri pariwisata merupakan sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan sektor ekonomi lainnya.

Terdapat beberapa komponen pengembangan kepariwisataan di daerah yang perlu diakomodasikan. Inskeep (1991) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan kepariwisataan di suatu daerah, perlu dikenali terlebih dahulu sifat dari pengembangan yang akan dilakukan tersebut. Beberapa hal yang perlu dikenali dari pengembangan pariwisata di suatu daerah antara lain:

- a. Kebijakan pembangunan daerah;
- b. Akses wilayah dan jaringan transportasi internal yang menghubungkan antara obyek, fasilitas, dan jasa pelayanan lainnya;
- c. Tipe dan lokasi atraksi pariwisata;
- d. Lokasi pengembangan kegiatan kepariwisataan termasuk area perhotelan/resort;

- e. Jumlah, tipe, dan lokasi akomodasi wisatawan dan fasilitas jasa dan pelayanan lainnya
- f. Kondisi lingkungan perwilayahan, sosial budaya, ekonomi dan analisis dampak;
- f. Tingkat edukasi masyarakat dan program-program pendukung yang telah dikembangkan di sekitar obyek wisata;
- g. Strategi pemasaran yang telah dilakukan dan program-program promosi lainnya;
- h. Struktur dan hierarki organisasi, legislasi, regulasi, dan kebijakan investasi; dan
- i. Teknik implementasi yang mencakup petahapan pengembangan, program/proyek pengembangan, serta regulasi zonasi kewilayahan.¹

Selain itu, Inskeep (1991) menambahkan bahwa terdapat pula komponen pengembangan kepariwisataan lainnya yang harus dilibatkan dalam pengembangan kepariwisataan di suatu daerah yaitu:

- a. Atraksi dan aktifitas wisatawan yang mencakup dekripsi kewilayahan, lingkungan alam, fitur, dan aktifitas terkait lainnya dan ada di area obyek;
- b. Akomodasi yang menjadi fasilitas bermalam wisatawan;
- c. Fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan pengembangan kepariwisataan termasuk pusat informasi wisatawan, restoran, pusat

¹ Inskeep, Edward. (1991). *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. Van Nostrand Reinhold: New York

cinderamata atau belanja, bank, penukaran uang, retail outlet penyedia barang kebutuhan, tempat-tempat pelayanan pribadi seperti spa, perawatan kesehatan, jasa keamanan dan perlindungan, serta fasilitas ticketing;

- d. Fasilitas dan jasa transportasi yang ada sebagai pendukung pergerakan wisatawan termasuk menuju obyek-obyek wisata;
- e. Infrastruktur pendukung lainnya termasuk listrik, jaringan drainase, pembuangan, dan telekomunikasi; dan
- f. Institusi terkait: pihak-pihak yang berkompeten dengan kegiatan pengembangan pariwisata secara luas.²

Sementara itu, Menurut Cooper, Fletcher, Gilberth, Steperd dan Wanhill dalam Sunaryo (2013:159) mengemukakan bahwa ada 4 komponen yang harus dimiliki oleh sebuah destinasi wisata, yaitu sebagai berikut:

1. *Attraction* (Atraksi), Merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan.

² ibid

Terdapat tiga modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan, yaitu 1) *Natural Resources* (alami), 2) Atraksi wisata budaya, dan 3) Atraksi buatan manusia. Modal kepariwisataan itu dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata ditempat dimana modal tersebut ditemukan. Ada modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan sehingga dapat membuat para wisatawan untuk menetap selama berhari-hari dan dapat berkali-kali dinikmati, atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa berkunjung ketempat yang sama. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata (DTW);

2. *Amenity* (Fasilitas) adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti: penginapan, rumah makan, transportasi dan agen perjalanan. Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yang banyak diperlukan untuk pembangunan sarana pariwisata ialah jalan raya, persediaan air, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, dan lain-lain. Mengingat hubungan antar

sarana dan prasarana, sudah jelas bahwa pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana. Ada saatnya prasarana dibangun bersama-sama dalam rangka pembangunan sarana wisata. Suatu tempat atau daerah dapat berkembang sebagai daerah tujuan wisata apabila aksesibilitasnya baik. Ada hubungan timbal balik antara sarana dan prasarana. Prasarana merupakan syarat untuk sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana;

3. *Accessibility* (Aksesibilitas) merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi;
4. *Ancillary* (Pelayanan Tambahan) harus disediakan oleh Pemda dari suatu daerah tujuan wisata baik untuk

wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan perundang undangan baik di jalan raya maupun di objek wisata. *Ancillary* juga merupakan hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, *Tourist Information*, *Travel Agent* dan *stakeholder* yang berperan dalam kepariwisataan atau kelembagaan (Institutions) yaitu terkait dengan keberadaan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah.

Dalam rangka menjadikan industry kepariwisataan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pemerintah menerbitkan UU No, 10/2009 tentang Kepariwisata.

Dalam UU No. 10/2009 dijelaskan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Selain itu, dalam UU No. 10/2009 juga dijelaskan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Serta bertujuan untuk: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; c) menghapus kemiskinan; d) mengatasi pengangguran; e) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f) memajukan kebudayaan; g) mengangkat citra bangsa; h) memupuk rasa cinta tanah air; i) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j) mempererat persahabatan antarbangsa.³

Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan nasional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 dan menetapkan peta

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus dua puluh dua) kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional meliputi: a. Destinasi Pariwisata; b. Pemasaran Pariwisata; c. Industri Pariwisata; dan d. Kelembagaan Kepariwisata.

Selanjutnya, dalam permen tersebut juga dijelaskan bahwa visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dan untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

1. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
2. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan

4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Salah satu Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ke-38 yaitu “Makassar-Takabonerate dan sekitarnya”, dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang terdiri dari KPPN Makassar

Kota dan sekitarnya, KPPN Maros Karst dan sekitarnya, KPPN Bulukumba dan sekitarnya, KPPN Wajo dan sekitarnya, KPPN Pare-Pare dan sekitarnya, serta KPPN Takabonerate dan sekitarnya. Untuk KPPN Toraja dan sekitarnya serta KPPN Palopo dan sekitarnya bergabung dengan provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dalam DPN Toraja–Lorelindu dan sekitarnya.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi selatan yang ditetapkan ke dalam Kawasan Rencana Induk Kepariwisata Nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur, pada tahun 2021 terdapat 37 destinasi objek wisata yang tersebar di kabupaten Luwu Timur.⁴ Destinasi objek wisata di Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh tempat wisata alam, seperti Danau Matano, Cagar Alam Perburuan, Danau Towuti, Air Terjun Mata Buntu, Pulau Bulu Poloe, Pemandian Alam Mantadulu, Pantai Balo-Balo, Gua Batu Putih, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari table dibawah ini:

Table 1.1
Objek Wisata di Kabupaten Luwu Timur 2021

No	Nama	Lokasi
1	Danau Matano	Desa Matano Kec. Nuha
2	Cagar Alam Perburuan	Desa Matano Kec. Nuha
3	Mata Air Matano (Bura-Bura)	Desa Matano Kec. Nuha
4	Makam Mokole Lakamandiu	Desa Matano Kec. Nuha
5	Pantai Ide	Desa Magani Kec. Nuha
6	Pantai Pomua Dahu-Solonsa	Desa Magani Kec. Nuha

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur, “Publikasi Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2023”, diakses pada laman <https://luwutimurkab.bps.go.id/> pada pukul 16.59 WITA.

7	Bumi Perkemahan Sawerigading	Desa Magani Kec. Nuha
8	Pantai Kupu-Kupu-Tapu Singkole	Desa Magani Kec. Nuha
9	Pantai Molino Topundau	Desa Magani Kec. Nuha
10	Pantai Impian-Old Camp	Desa Sorowako Kec. Nuha
11	Danau Towuti	Desa Timampu Kec. Towuti
12	Danau Mahalona	Desa Mahalona Kec. Towuti
13	Danau Tapparang Masapi	Desa Mahalona Kec. Towuti
14	Air Terjun Mata Buntu	Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
15	Bukit Agro (Tabarano)	Desa Tabarano Kec. Wasupona
16	Kali Dingin (Wasuponda)	Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
17	Pulau Bulu Poloe	Desa Harapan Kec. Malili
18	Air Terjun Atue	Desa Atue Kec. Malili
19	Sungai Malili	Desa Malili Kec. Malili
20	Hutan Mangrove	Kec. Malili/Wotu/Burau
21	Sumur Sawerigading	Desa Baruga Kec. Malili
22	Permandian Alam Mantadulu	Desa Mantadulu Kec. Angkona
23	Air Terjun Tokio	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
24	Sungai Uelanti	Desa Kasintuwu, Kec. Mangkutana
25	Pemandian Lopi	Desa Margolembo Kec. Mangkutana
26	Air Terjun Saloanuang	Desa Kasintuwu, Kec. Mangkutana
27	Pantai Balo-Balo	Desa Lera Kec. Wotu
28.	Banua Pangka	Desa Bawalipu Kec. Wotu
29	Makam Puang Sanro	Desa Lampenai Kec. Wotu
30	Pantai Lemo	Desa Mabonta Kec. Burau
31	Gua Batu Putih	Desa Batu Putih Kec. Burau
32	Pantai Ujung Suso	Desa Mabonta Kec. Burau
33	Permandian Air Panas	Desa CendanaKec. Burau
34	Kuburan Tua	Desa Mabonta Kec. Burau
35	Air Terjun Bonepute	Desa Bonepute Kec. Burau
36	Semoga Lestari Water Park	Desa Lestari Kec. Tomoni
37	Batu Papan	Desa Rantemario, Kec. Tomon

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Dalam rangka meningkatkan industri pariwisata di Kabupaten Luwu Timur, dan melaksanakan amanat Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap daerah berhak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan kepada masyarakat, serta Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang mewajibkan setiap daerah provinsi, kabupaten atau kota untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan yang diatur dan ditetapkan melalui peraturan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Luwu Timur 2021 - 2027. Melalui perda tersebut diharapkan pembangunan pariwisata Kabupaten Luwu Timur memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu Timur, yaitu mewujudkan pesona pariwisata yang berwawasan pelestarian budaya dan alam dengan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan Budaya Masyarakat.

Beberapa destinasi pariwisata yang kemudian berusaha untuk dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur diantaranya Danau Matano, Danau Towuti, Air terjun Salunua, Air terjun Atue, Air terjun matabuntu, Air terjun kali dingin, Pantai Lemo, Pantai ujung suso, Pulau Bulu Poloe, Banua pangka, Permandian alam To'Liang dan Goa tengkorak To'Liang.

Akan tetapi dalam perjalanannya yang terjadi pada pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur, menurut Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Andi Tabacina yakni masih kurangnya sarana dan prasarana, seperti sarana transportasi untuk menunjang

pergerakan internal dan konektivitas antar wilayah kabupaten. Terlebih pada wisata ke pulau-pulau yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang masih mengandalkan perahu milik pribadi masyarakat bukan dari Pemerintah daerah dan itupun jumlahnya masih sangat terbatas.

Selain permasalahan transportasi, masalah lain yang juga berdampak pada pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur yaitu masih kurangnya promosi wisata yang dilakukan Pemerintah Daerah, sebab pengunjung wisata masih didominasi dari warga lokal itupun jumlahnya masih kecil dan beberapa objek wisata yang tidak terurus sehingga terjadi penumpukan sampah.⁵

Dari kondisi objektif diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan berfokus pada pembangunan kepariwisataan serta factor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur. Sehingga mengangkat judul Penelitian : **ANALISIS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR.**

1.2. Rumusan Masalah

Hadirnya otonomi daerah sebagai implikasi kemandirian daerah, mengharuskan Kabupaten Luwu Timur untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing salah satunya sector kepariwisataan. Sehingga dari pembangunan kepariwisataan tersebut dapat menjadi salah satu

⁵ <https://warta.luwutimurkab.go.id/2015/03/24/mosquito-borne-diseases-has-threaten-world/>
(diakses pada tanggal 19 februari 2023)

sumber pendapatan daerah serta upaya memberikan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial budaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat pertanyaan penelitian, yakni :

1. Bagaimana pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur; dan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi akademis, penelitian ini akan menambah perspektif *civitas akademika* prodi ilmu pemerintahan, sebagai bahan kajian ilmu pemerintahan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini di bidang pembangunan kepariwisataan;

2. Dari segi metodologis, hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mengkaji pembangunan kepariwisataan;
3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya secara meluas mengenai bagaimana cara melakukan pembangunan kepariwisataan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (*literature*) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta pendapat yang berhubungan dengan penelitian.⁶

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 Konsep Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya

⁶ repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../9708/SKRIPSI%20UTUH%20PDF.pdf?
(diakses pada tanggal 19 februari 2023)

serta pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.⁷

Secara etimologis, kata analisis yang dalam bahasa Inggris “*analysis*” berasal dari leksem bahasa Yunani *analyein* (gabungan morfem *ana-* dan *lyein*) berarti melonggarkan atau memisahkan (memisahkan keseluruhan menjadi bagian-bagian). Dalam kamus Meriam-Webster (2009: CD-ROM version), kata analisis memiliki beberapa dimensi makna. Dua di antaranya yang berkaitan dengan filsafat dimaknai dengan “*a method in philosophy of resolving complex expressions into simpler or more basic ones*” (metode dalam filsafat yang menguraikan ungkapan yang rumit ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau yang lebih mudah) dan “*clarification of an expression by an elucidation of its use in discourse*” (klarifikasi ungkapan dengan cara menjelaskan penggunaannya dalam wacana).⁸

Menurut konteks kebahasaan, analisis dimaknai sebagai penyederhanaan bentuk kata dengan memisahkan akar kata dari imbuhan sebagai salah satu metode bedah bahasa. Istilah analisis menurut Kallsaff (2004) adalah perincian, Selanjutnya ditegaskan oleh Kallsaff, bahwa di dalam filsafat analisis berarti perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa

⁷ <http://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada tanggal 19 februari 2023)

⁸ Sabarti Akhadiyah dan Winda Dewi Listyasari (Ed.), 2011, *Filsafat Ilmu Lanjutan*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, hal. 3

sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan atas makna yang dikandungnya. Dalam perspektif lain analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi.⁹

Di tingkat ini seseorang diharapkan menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip, atau prosedur yang telah ditentukan.. Kata kerja operasional yang biasa digunakan adalah membedakan dan mendiskriminasikan, mendiagramkan, memilih, memisahkan, membagi-bagikan, mengilustrasikan, mengklasifikasikan.¹⁰

Analisis merupakan bentuk kegiatan logika yang menyoroti kebenaran konkret suatu proposisi, dan memusatkan perhatian mula-mula dan terutama pada forma lugasnya (yang pada dasarnya matematis), yaitu nilai kebenarannya. Jika analisis dikategorikan sebagai metode berpikir dalam mengungkapkan pengetahuan dan kebijaksanaan, maka tentu didalamnya terdapat serangkaian fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk menguraikan ataupun menyederhanakan ungkapan atau hasil pemikiran. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya

⁹ *Ibid* Hal. 17

¹⁰ *Ibid* Hal. 23

menjelaskan setiap entitas yang dikandung dalam ungkapan pemikiran dan perasaan manusia.¹¹

Analisis pada akhirnya dimaknai sebagai kegiatan berpikir yang melakukan perincian terhadap istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagiannya agar dapat menangkap makna yang dikandungnya atau memahami komponen terlebih dahulu kemudian menguraikan komponen. Berkaitan dengan itu, penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Jadi tidak salah kalau ada yang menyatakan bahwa analisis adalah gerbang logika.¹²

Menganalisis suatu fenomena atau gejala, terlebih dahulu harus mengetahui suatu keadaan yang akan dianalisis dan juga data yang tersedia harus lengkap karena akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Fungsi suatu analisis dalam suatu hal sangat penting dalam menentukan suatu kebijaksanaan terutama mengenai tindak lanjut pembangunan karena dalam mengambil keputusan peran analisis sangat berarti, dalam analisis yang diperlukan adalah kesimpulan dimana dapat digunakan pegangan terhadap pelaksanaan tindakan. Dalam menganalisis suatu fenomena atau gejala maka dapat digunakan 2 pendekatan yakni sebagai berikut:

¹¹ *Ibid* Hal.10

¹² *Ibid* Hal.4

1. Pendekatan Institusional

Pendekatan ini mengacu pada teori kelembagaan¹³ (*Institutional Theory*), Scott menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan *regulative* yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti *rules*, *norms*, *cultural benefit*, peran dan sumber daya material.

Hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada. Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut.

Scott juga menyatakan bahwa teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi. Misalnya organisasi yang berorientasi pada layanan publik, dalam

¹³ http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/nl/@file_skripsi/Isi2570226781920.pdf diakses 27 April 2018 11:45

pengambilan keputusan sudah tentu dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang berlaku di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lingkungan masyarakat.

Berangkat dari hal ini, maka dapat dijelaskan bahwa organisasi sebagai pihak yang menerapkan kebijakan harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan akhir dari sebuah kebijakan dapat tercapai. Teori ini menjadi penjelas yang kuat dan populer bagi tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, eksternal, sosial, ekspektasi masyarakat, dan lingkungan. Faktor-faktor ini cenderung menunjuk pada hubungan organisasi dengan pihak eksternal, seperti domain Negara (*state*), sektor swasta (*private*), akademisi dan masyarakat (*society*).

2. Pendekatan Behavioral

Pendekatan ini awalnya diperkenalkan oleh John B. Watson. Pendekatan ini cukup banyak mendapat perhatian dalam psikologi di antara tahun 1920-an s/d 1960-an. Ketika Watson memulai penelitiannya, dia menyarankan agar pendekatannya ini tidak sekedar satu alternatif bagi pendekatan instinktif dalam memahami perilaku sosial, tetapi juga merupakan alternatif lain yang memfokuskan pada pikiran, kesadaran, ataupun imajinasi.¹⁴

¹⁴ <http://digilib.uinsby.ac.id/2581/5/Bab%202.pd>

Pendekatan perilaku memusatkan perhatian pada cara orang bertingkah laku dalam situasi dan kondisi nyata organisasi. Pendekatan ini merupakan satu metode yang secara sistematis dipakai para penganut behaviorisme untuk mengkritik pendekatan tradisional, karena mereka menganggap para pendukung pendekatan tradisional melakukan generalisasi tanpa bukti-bukti yang cukup. Para penganut perilaku tidak lagi menekankan efisiensi sebagai tujuan primer organisasi, karena mereka percaya bahwa organisasi merupakan satu sistem sosial. Sebagai sistem sosial, setiap organisasi mengandung konflik, kohesi, dan interaksi. Semua faktor ini harus dipelajari agar dapat memahami secara utuh bagaimana sesuatu organisasi berjalan.

2.3 Konsep Pembangunan

Pembangunan pada prinsipnya merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk menuju modernisasi dalam rangka mensejahterakan rakyat baik secara lahir maupun batin. Dengan pemberian kewenangan yang luas kepada Kabupaten/Kota melalui undang-undang otonomi daerah, maka Kabupaten/Kota dituntut harus benar-benar untuk dapat mengembangkan semua potensi sumber daya alam yang pada gilirannya akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan kepariwisataan di daerah. Dengan adanya kegiatan pariwisata dapat menjadi sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi regional. Masyarakat disekitar obyek wisata dapat memanfaatkannya untuk menciptakan lapangan kerja baru seperti berjualan dan memasarkan hasil-hasil kerajinan daerahnya dan sekaligus dapat juga memberi ruang kepada bidang-bidang lain untuk berkembang seperti perhotelan, transportasi, dan dapat menumbuhkan usaha masyarakat sekitar obyek wisata untuk berwirausaha. Dengan demikian pariwisata dipandang dapat mengurangi jumlah pengangguran yang bertujuan sebagai penopang perekonomian masyarakat.

Perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan kepariwisataan di daerah. Dengan adanya kegiatan pariwisata dapat menjadi sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi regional. Masyarakat disekitar obyek wisata dapat memanfaatkannya untuk menciptakan lapangan kerja baru seperti berjualan dan memasarkan hasil-hasil kerajinan daerahnya dan sekaligus dapat juga memberi ruang kepada bidang-bidang lain untuk berkembang seperti perhotelan, transportasi, dan dapat menumbuhkan

usaha masyarakat sekitar obyek wisata untuk berwirausaha. Dengan demikian pariwisata dipandang dapat mengurangi jumlah pengangguran yang bertujuan sebagai penopang perekonomian masyarakat.

Menurut Bintoro dan Mustopadidjaja, pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir (Tjokroamidjojo, 1995:18). Sementara itu, Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2009:4).

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya melibatkan tiga faktor : 1. Manusia dengan beragam perilakunya. 2. Faktor dana yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan negara. 3. Faktor alam yang sulit diramalkan.

2.3 Konsep Pariwisata

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut, sedangkan kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Jika dilihat dari segi etimologinya, kata pariwisata berasal dari

bahasa sansekerta, yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*pari*” dan “*wisata*”. *Pari* berarti berulang-ulang, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan berulang-ulang atau berkali-kali.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wisata adalah bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;

¹⁵ Oka A. Yoeti, 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, Hal 103

- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
- e. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
- f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
- g. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata; dan
- i. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau

lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Daya tarik wisata yang juga sering disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu tempat daerah tujuan wisata. objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisata karena mempunyai sumber daya dimana sumber daya yang dimaksud adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk kunjungan wisata sehingga terjadi interaksi antara sesama manusia, pengusaha objek wisata dan daya tarik wisata dikelompokkan menjadi tiga ¹⁶ :

a. Objek Wisata Alam

Objek wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi dan berdayatarik bagi wisatawan serta yang ditunjukkan untuk pembinaan cinta alam, baik dalam kegiatan alam maupun setelah pembudidayaan. Potensi objek wisata alam dapat dibagi menjadi empat kawasan, yaitu: 1) Flora dan fauna 2) Keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya ekosistem pertanian atau hutan bakau. 3) Gejala alam,

¹⁶ Gamal Suwanto, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, Hal. 19

sumber air panas, air terjun dan danau. 4) Budidaya sumber daya alam, sawah, kebun, peternakan.

b. Objek wisata sosial dan budaya

Objek Wisata Sosial Budaya adalah objek wisata yang memanfaatkan keadaan sosial budaya yang terdapat di suatu wilayah untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata. Objek wisata sosial budaya meliputi museum, peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukan, dan kerajinan. Objek wisata ini adalah merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata. seperti diketahui bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang terdahulu;

c. Objek Wisata Minat Khusus

Objek wisata minat khusus adalah jenis wisata baru dikembangkan di Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motif khusus, biasanya para wisatawan harus memiliki keahlian. Seperti berburu, mendaki gunung, arum jeram, agrowisata dan lain-lain.

Wisata memiliki karakteristik-karakteristik antara lain:

- a. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya;

- b. Melibatkan komponen - komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata dan lain-lain;
- c. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi wisata;
- d. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan;
- e. Tidak untuk mencari nafkah ditempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi.¹⁷

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah wisata yang selanjutnya disebut dengan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata aksesibilitas serta masyarakat yang salin terkait. Dalam Pengembangan destinasi pariwisata terdapat komponen-komponennya harus terpenuhi, komoponen tersebut antara lain:

- a. Objek dan daya Tarik wisata

¹⁷ Suyitno, 2001, *Perencanaan Wisata*, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 19

Atraksi atau objek daya tarik wisata merupakan komponen yang signifikan dalam menarik kedatangan wisatawan. Hal ini dapat dikembangkan mengenai atraksi wisata disebut dengan model atau sumber kepariwisataan. Model atraksi yang menarik kedatangan wisatawan ada tiga, yaitu pertama *natural resources* (alam) seperti gunung, danau, pantai dan bukit, ke dua atraksi budaya seperti arsitektur rumah tradisional, situs arkeolog, seni dan kerajinan, ritual, festival dan yang lainnya, ke tiga atraksi buatan seperti acara keluarga, berbelanja pameran konferensi dan lain-lain.¹⁸

Daya tarik merupakan faktor utama yang menarik wisatawan mengadakan perjalanan mengunjungi suatu tempat, baik suatu tempat primer yang menjadi tujuan umumnya atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam suatu perjalanan primer karna keinginannya untuk menyaksikan, merasakan, dan menikmati daya tarik tujuan tersebut. Sedangkan daya tarik sendiri dapat diklasifikasikan kedalam daya tarik lokasi yang merupakan daya tarik permanen.

b. Prasarana Wisata

¹⁸ Khusnul Khotimah, "Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus Pada Kawasan Situs Trowulan Sebagai Pariwisata Budaya Unggulan Di Kabupaten Mojokerto)", Jurnal Administrasi Binis, Vol. 41 No 1 Januari 2017, Hal. 59

Pasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang multlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, aliran listrik, telekomunikasi terminal, jembatan dan lain sebagainya.¹⁹

Prasarana ini dibutuhkan untuk melayani wisatawan selama perjalanan wisata. Fasilitas ini cenderung berorientasi pada daya tarik wisata di suatu lokasi, sehingga fasilitas ini harus terletak dekat dengan objek wisatanya.

c. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Lebih dari itu, selera pasar dapat menentukan tutnutan berbagai sarana yang dimaksud.²⁰

Berbagai sarana wisata yang disediakan didaerah tujuan wisata antara lain biro perjalanan, alat transportasi, alat komunikasi, serta sarana pendukung lainnya. Tidak semua

¹⁹ Unggul Priyadi, 2006, *Pariwisata Syariah Prospek Dan Pengembangan*, Yudistira Media, Jakarta, Hal. 21

²⁰ *Ibid* Hal. 22

objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap, pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.

d. Promosi dan Pemasaran

Promosi adalah suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana agar atraksi wisata dapat dikunjungi. Untuk perencanaan promosi adalah bagian penting. Dapat dipahami bahwa promosi pariwisata merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atau menginformasikan kepada calon wisatawan bahwa terdapat objek wisata di suatu daerah tersebut dengan memiliki daya tarik wisata atau atraksi wisata yang dapat di nikmati oleh wisatawan. Promosi menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pengembangan pariwisata, dikarenakan promosi memberikan peran penting bagi objek wisata tersebut.

2.4 Pembangunan Kepariwisataan

Pembangunan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

1. manfaat;
2. kekeluargaan;
3. adil dan merata;
4. keseimbangan;

5. kemandirian;
6. kelestarian;
7. partisipatif;
8. berkelanjutan;
9. demokratis;
10. kesetaraan; dan
11. kesatuan.²¹

Dalam perjalanannya, pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Terdapat empat aspek atau komponen yang terdapat dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu:

1. Industri Pariwisata;
2. Destinasi Pariwisata;
3. Pemasaran Pariwisata; dan
4. Kelembagaan Pariwisata.

Keempat hal tersebut kemudian secara rinci dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPKN). Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa:

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

1. Industri Pariwisata meliputi Pembangunan struktur (fungsi, hirarkhi, hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis. Dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
2. Destinasi Pariwisata meliputi Pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata serta Pemberdayaan masyarakat, secara terpadu dan berkesinambungan;
3. Pemasaran Pariwisata meliputi Pemasaran pariwisata bersama terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya siang; dan
4. Kelembagaan Pariwisata meliputi Pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.²²

Selain itu, menurut Cooper, Fletcher, Gilberth, Steperd dan Wanhill dalam Sunaryo (2013:159) mengemukakan bahwa ada 4 komponen yang harus dimiliki oleh sebuah destinasi wisata, yaitu sebagai berikut:

²² Prakoso, Aditha Agung. "Dampak Multiganda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) terhadap Kepariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Kepariwisata* 10.1 (2016): 1-26.

5. *Attraction* (Atraksi), Merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Terdapat tiga modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan, yaitu 1) *Natural Resources* (alami), 2) Atraksi wisata budaya, dan 3) Atraksi buatan manusia. Modal kepariwisataan itu dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata ditempat dimana modal tersebut ditemukan. Ada modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan sehingga dapat membuat para wisatawan untuk menetap selama berhari-hari dan dapat berkali-kali dinikmati, atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa berkunjung ketempat yang sama. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata (DTW);

6. *Amenity* (Fasilitas) adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud

seperti: penginapan, rumah makan, transportasi dan agen perjalanan. Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yang banyak diperlukan untuk pembangunan sarana pariwisata ialah jalan raya, persediaan air, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, dan lain-lain. Mengingat hubungan antar sarana dan prasarana, sudah jelas bahwa pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana. Ada saatnya prasarana dibangun bersama-sama dalam rangka pembangunan sarana wisata. Suatu tempat atau daerah dapat berkembang sebagai daerah tujuan wisata apabila aksesibilitasnya baik. Ada hubungan timbal balik antara sarana dan prasarana. Prasarana merupakan syarat untuk sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana;

7. *Accessibility* (Aksesibilitas) merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak

tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi;

8. *Ancillary* (Pelayanan Tambahan) harus disediakan oleh Pemda dari suatu daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan perundang undangan baik di jalan raya maupun di objek wisata. *Ancillary* juga merupakan hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, *Tourist Information*, *Travel Agent* dan *stakeholder* yang berperan dalam kepariwisataan atau kelembagaan (Institutions) yaitu terkait dengan keberadaan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah.

2.5 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu Timur

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyadari pentingnya menyiapkan grand design pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu Timur dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu Timur. Sekaligus melaksanakan amanat UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan berbagai perubahan dalam pengaturan kepariwisataan mengharuskan tiap-tiap daerah menyesuaikan diri. Dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa *“Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan Nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/kota.”* Juga dalam pasal 9 disebutkan bahwa *“Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.”*

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu Timur mencoba untuk mewujudkan Visi Pariwisata Daerah yakni: *“Mewujudkan pesona pariwisata yang berwawasan pelestarian budaya, dan alam dengan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan Budaya Masyarakat”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pariwisata yang berbasis pesisir, daratan dan pegunungan yang mendukung pelestarian alam dan budaya;
- b. Menciptakan pariwisata yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan terpadu;
- c. Meningkatkan tata kelola pariwisata yang berintegrasi, professional dan berkualitas; dan
- d. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPAR-KAB) Luwu Timur ini kemudian diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata Daerah yang meliputi, potensi wisata alam, potensi wisata budaya dan potensi buatan. Selain itu, RIPPAR-KAB ini juga diharapkan mampu memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan actual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dapat dikembangkan secara berkelanjutan; menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di Daerah sejalan dengan perkembangan kewilayahan; dan memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.

Adapun ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang termuat dalam peraturan ini yaitu;

- a. Identifikasi, perencanaan, dan pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. Pembangunan industry pariwisata; dan
- d. Penguatan kelembagaan kepariwisataan.

Lebih lanjut, keempat hal tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Pembangunan destinasi pariwisata meliputi:
 - Pembangunan pemberdayaan masyarakat;
 - Pembangunan daya tarik wisata;
 - Pembangunan prasarana;
 - Penyediaan fasilitas umum; dan
 - Pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- b. Pembangunan pemasaran meliputi pembangunan pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangky kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing;

c. Pembangunan industry pariwisata meliputi:

- Pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industry pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata (daya tarik wisata);
- Kawasan pariwisata;
- Jasa transportasi wisata;
- Jasa perjalanan wisata;
- Jasa makanan dan minuman;
- Penyediaan akomodasi;
- Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- Jasa informasi pariwisata;
- Jasa konsultan pariwisata;
- Jasa pramuwisata dan
- Wisata tirta spa, kerdibilitas bisnnis, serta tanggung jawab terhadap ingkungan alam dan social budaya.

d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- Pengembangan organisasi Pemerintah Daerah;
- Pengembangan organisasi swasta;
- Pengembangan organisasi masyarakat;
- Pengembangan sumber daya manusia;

- Pengembangan regulasi; serta
- Mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

2.6 Kerangka Berpikir

Pada hakekatnya pengembangan potensi pariwisata adalah suatu proses untuk memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang ada. Pengembangan objek wisata merupakan kegiatan membangun, memelihara, dan melestarikan pertanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya. Potensi Pengembangan Objek Wisata yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dimiliki pada obyek wisata yang dapat dijadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna.

Pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan pariwisata meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.²³

Untuk itu diperlukan sebuah strategi yang matang dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur sehingga potensi pariwisata daerah dapat berhasil dan membawa perubahan yang lebih baik bagi daerah tersebut, khususnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji dan dianalisis bagaimana pembangunan kepariwisataan serta factor pendukung dan penghambat pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur .

²³ Undang-undang No 10 tahun 2009 pasal 6 dan 7 tentang Kepariwisata

Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka disusun suatu kerangka pikir yang dijabarkan melalui skema dibawah ini:

Gambar Bagan Kerangka Pikir

